

**LAKIP
TAHUN 2023**



**LAPORAN KINERIA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOPERASI DAN UKM
KOTA BANDAR LAMPUNG**

DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG

Jl.Dr.Susilo No.2 Lantai 9 Bandar Lampung

Website : <http://diskopukm.bandarlampungkota.go.id>

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yaitu Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Bandar Lampung secara transparan dan akuntabel, maka telah diterapkan sistem pertanggungjawaban yang sistematis jelas dan terukur melalui rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja pada setiap akhir Tahun Anggaran.

Adapun maksud dan tujuan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkrit dan menyeluruh tentang hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandar Lampung, Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari adanya kekurangan dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami berharap mendapat masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Laporan Kinerja untuk waktu yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi serta dapat menjadi referensi untuk meningkatkan upaya pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terutama di Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang.

Bandar Lampung,

2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA BANDAR LAMPUNG


RIANA APRIANA, Ap.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750427 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI OPD

Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung, maka susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdiri dari:

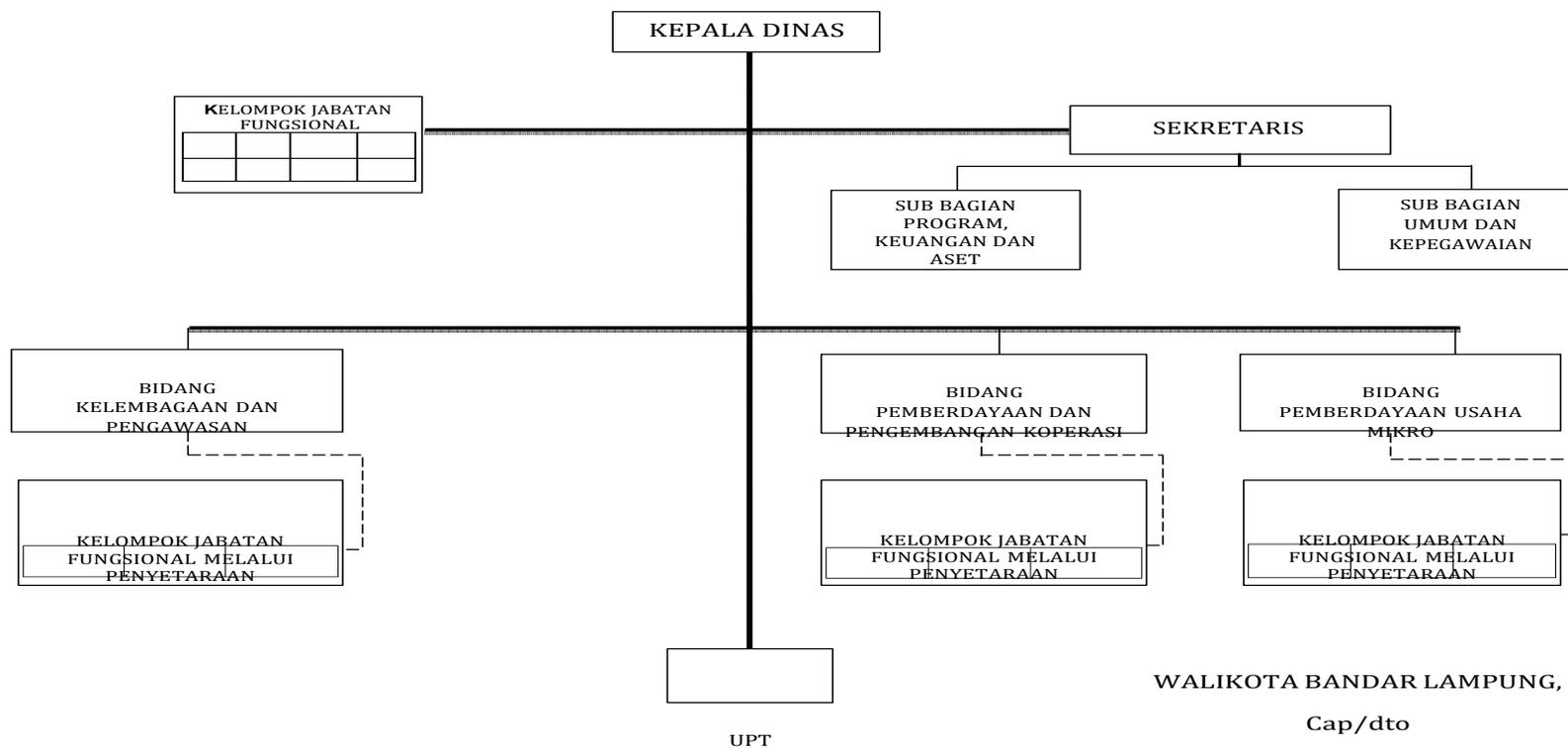
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi : Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
- f. Unit Pelaksana Teknis.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 55 TAHUN 2021
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
 KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BANDAR LAMPUNG



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,
 Cap/dto

1.2. TUGAS, POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung adalah :

Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai denganlingkupnya tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkupnya tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas danfungsinya.

1.3. ISU – ISU STRATEGIS

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas serta hasil evaluasi tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Daya saing produk koperasi dan UKM belum optimal baik dalam hal kemasan maupun standarisasi.
2. Peraturan-peraturan perkoperasian belum diterapkan secara penuh oleh gerakan koperasi serta regulasi yang ada terkait pemberdayaan koperasi UKM sudah tidak relevan, khususnya pemberdayaan koperasi.

3. Memperkuat Kelembagaan Koperasi dan UKM meliputi updating data koperasi dan UKM, mempercepat penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), mendorong pemasyarakatan koperasi, serta meningkatkan kualitas manajerial SDM Koperasi dan UKM.
4. Jiwa kewirausahaan koperasi dan UKM kurang berorientasi pasar, sehingga perlu untuk memperluas dan memperdalam jangkauan pemasaran produk koperasi dan UKM melalui Akrindo (Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia), Gedung SMESCO, Galeri Dekranasda, Galeri Batik dan Cinderamata, serta membangun kerjasama dengan platform pemasaran oneline yang tersedia.
5. Masih kurangnya fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi pelaku koperasi UKM.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Terkait hal tersebut, berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2023 pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdapat 19 (Sembilan belas) orang Pegawai Negeri Sipil dan 14 (dua belas) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut ini :

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2023

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	13
2.	Perempuan	20
Jumlah		33

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini :

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan per 31 Desember 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Doktoral (S3)	-
2.	Pasca Sarjana (S2)	6
3.	Sarjana (S1)	15
4.	D3	-
5.	SMA	12
Jumlah		33

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.2 tingkat pendidikan aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 15 (Lima belas) orang atau sebesar 45,45%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung secara umum. Jumlah Aparatur Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang menamatkan pendidikan S2 tercatat sebanyak 6 (Enam) orang. Secara presentase, jumlah tersebut mencapai 18,18% dari seluruh Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel I.3 dan menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel I.4. berikut ini :

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang per 30 Desember 2023

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
	Pembina (IV/a)	3
	Jumlah	4
2.	Panata Tingkat I (III/d)	10
	Penata (III/c)	2
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-
	Penata Muda (III/a)	-
	Jumlah	12
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	2
	Pengatur (II/c)	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	3
4.	Tenaga kontrak	14
Jumlah Total		33

Tabel 1.4. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan per 30 Desember 2023

No.	Uraian	Es II	Es III	Es IV	FP Madya	FP Muda	Staf	Jumlah
1.	Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kota Bandar Lampung	1						1
2.	Sekretariat		1	1			11	13
3.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan,		1	-		3	2	6
4.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		1	-		3	4	8
5.	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro		1	-		1	3	5
8.	Fungsional			-	-	-		
Jumlah		1	4	1		7	20	33

1.5. SARANA DAN PRASARANA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk terlaksananya kegiatan diperlukan pula sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung. Sarana/prasarana yang ada Di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.5
Sarana dan Prasarana (Posisi 30 Desember 2023)

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	Kendaraan roda empat	1	1	-	-
2	Kendaraan roda dua	6	5	1	-
3	Lemari besi	5	5	-	-
4	Filing Kabinet	18	18	-	-
5	Brankas	-	-	-	-
6	Lemari kayu	5	5	-	-
7	Faximile	1	1	-	-
8	Meja kerja 1 Biro	10	10	-	-
9	Meja kerja ½ Biro	5	5	-	-
10	Meja Kayu	1	-	-	-
11	Kursi Sofa	1	1	-	-
12	Kursi Putar	44	44	-	-
13	Kursi putar secretariat	4	4	-	-
14	Kursi Lipat	41	41	-	-
15	Meja Komputer	1	1	-	-
16	Meja Kerja	5	5	-	-
17	AC	1	1	-	-
18	Kipas Angin	7	4	-	3
19	Telivisi	2	2	-	-
20	Komputer	12	12	-	-

21	Notebook	4	2	-	-
22	UPS	2	2		-
23	Printer	8	8	-	-
24	Rak Arsip	6	6	-	-
25	Router	1	1	-	-
26	Switch	1	1	-	-
29	Almari Arsip	1	1	-	-
30	Almari	3	3	-	-
31	Lemari	5	5	-	-
32	Meja tulis 1 biro	10	10	-	-
33	Kursi putar staf	2	2	-	-
34	Komputer	3	3	-	-
35	PC	2	2	-	-
36	Laptop	2	2	-	-
37	Mesin Absen	1	1	-	-

Catatan : B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak Berat

1.6. KEUANGAN

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sektor Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM kota Bandar Lampung pada tahun 2023 didukung dana yang berasal dari APBD Kota Bandar Lampung.

Anggaran di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung sebesar **Rp. 7.085.233.615,00** untuk 7 (tujuh) program.

Tabel 1.6
Program dan Anggaran Tahun 2023
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.3.587.182.292
2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.12.960.000
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.84.420.136
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp.410.170.000
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp.778.503.750
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.102.779.864
7. Program Pengembangan UMKM	Rp.819.000.000
Jumlah	Rp.5.795.016.042

1.7. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah Kota Bandar Lampung mendukung Misi ke- 4 yaitu **Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.**

Misi tersebut memiliki satu Tujuan dengan dua Sasaran serta Strategi dan arah Kebijakan dirumuskan sbb:

Tabel 1.7
Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD
Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026
terkait Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung

No	Tujuan	Strategis	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi	1. Mengembangkan koperasi dan UMKM sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan disertai Peningkatan kualitas dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru	1. Mendorong Penguatan Kelembagaan dan Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar 2. Meningkatkan fasilitasi/pendampingan dalam mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan volume usaha 3. Meningkatkan aksesibilitas koperasi dan UMKM terhadap pembiayaan tanpa bunga maupun dengan bunga rendah/terjangkau baik dengan lembaga keuangan Bank maupun Non Bank. 4. Meningkatkan iklim usaha mikro kecil dan koperasi yang kondusif pada era perdagangan bebas/globalisasi

1.8. CASCADING KINERJA

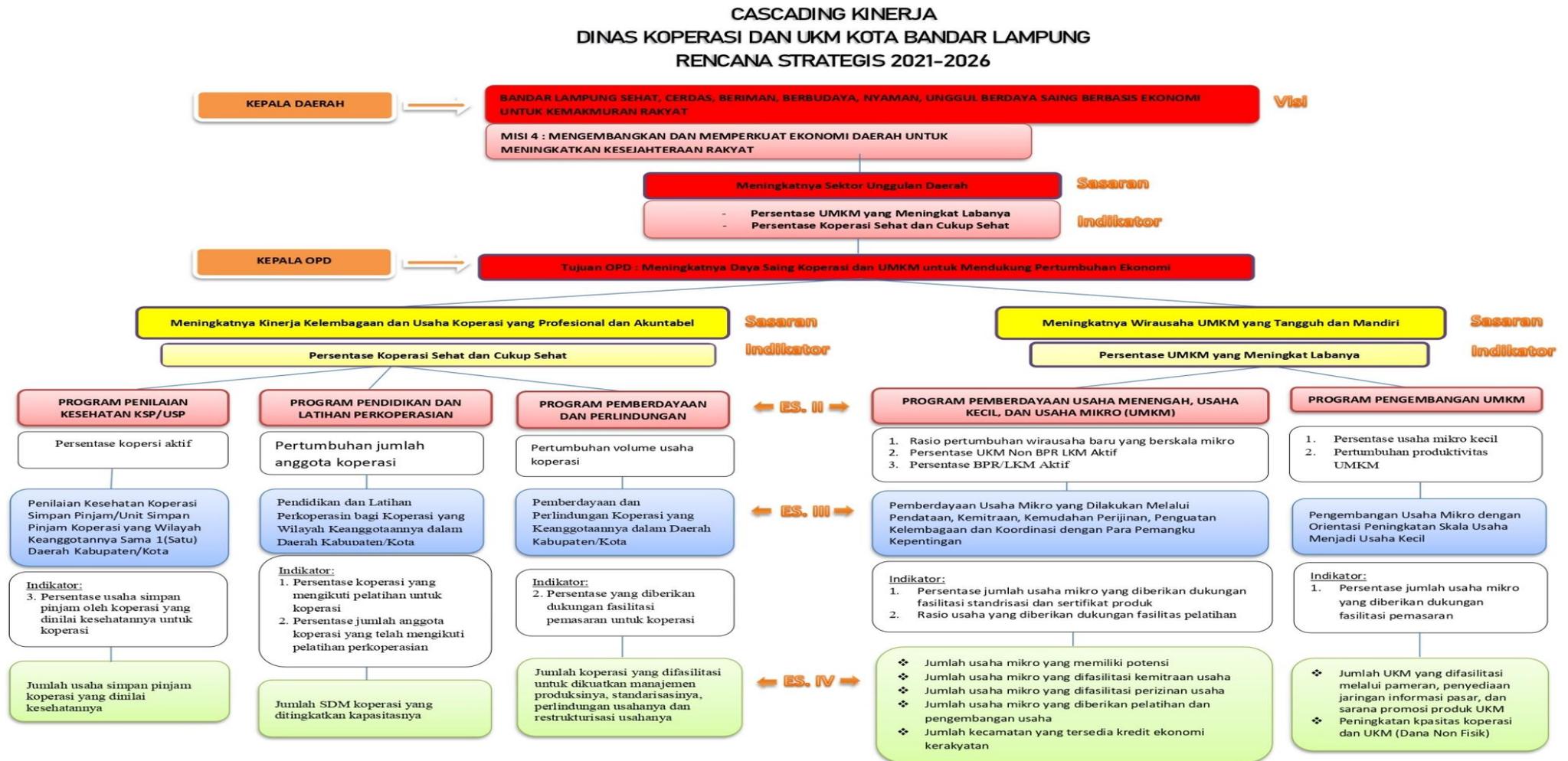
Dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2023, untuk mengukur keberhasilannya dibuatlah Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2023 yang merupakan target kinerja dari Renstra Dinas Koperasi, UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja utama (IKU) serta anggaran. Di dalam Perjanjian Kinerja memuat rencana kinerja yang disertai tergetnya. Adapun rencana kinerja tahun 2023 beserta target tahun 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.8 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung**

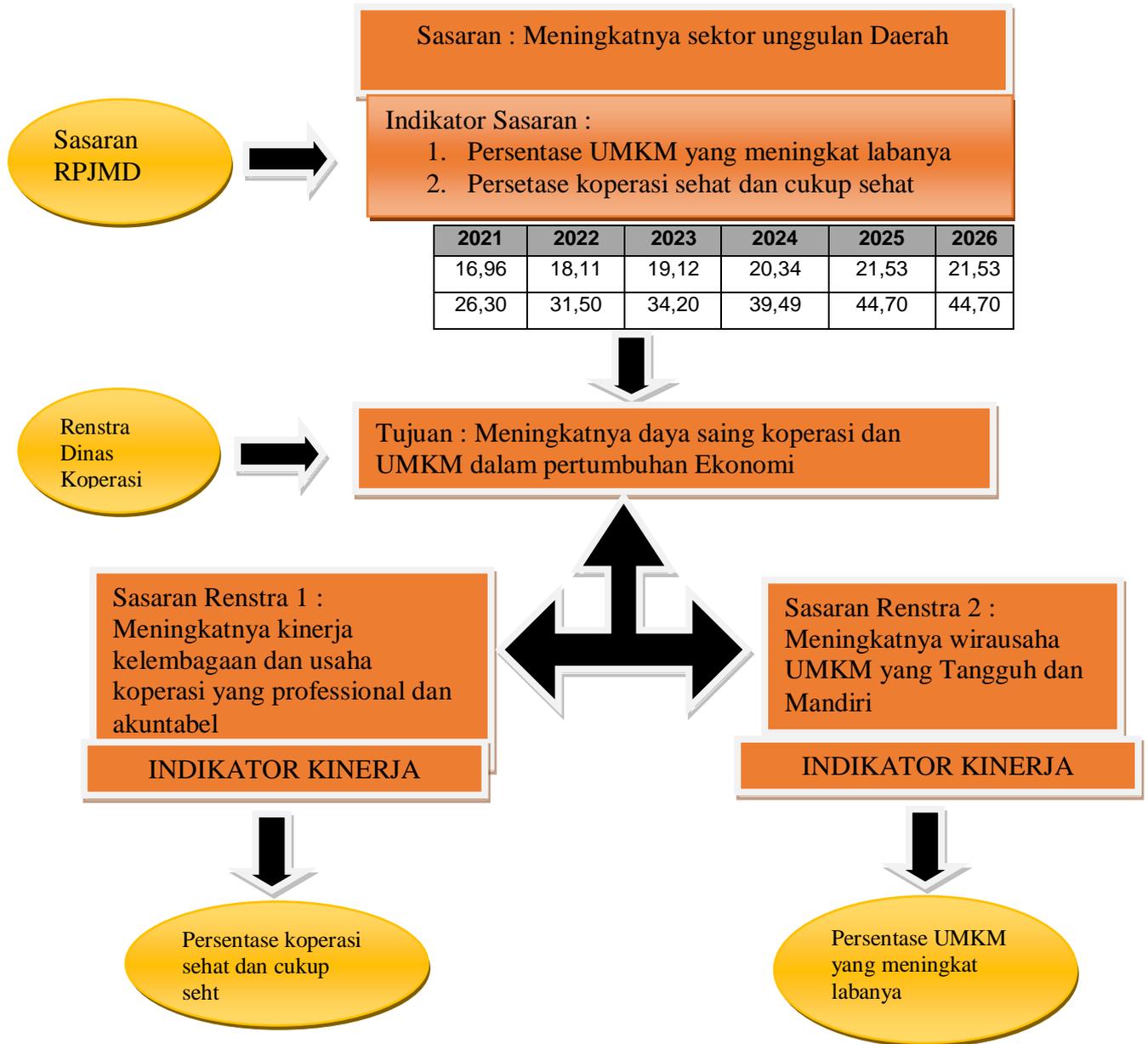
SASARAN/OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN
Meningkat- nya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan akuntabel	Pesentase koperasi sehat dan cukup sehat	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat dibagi Jumlah seluruh koperasi Dikali 100%
Meningkatnya wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	Jumlah UMKM yang meningkat labanya / Jumlah UKM dalam pengawasan x 100%
Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan usaha menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)	Hasil Penilaian Inspektorat Kota Bandar Lampung Capaian Tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut, didukung oleh 7 (tujuh) program, 11 (sebelas) kegiatan, 21 (dua puluh satu) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp.5.795.016.042,00**. sebagaimana diilustrasikan dalam bentuk keterkaitan dan cascading pada bagan berikut :

Gambar 1.2. CASCADING KINERJA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG

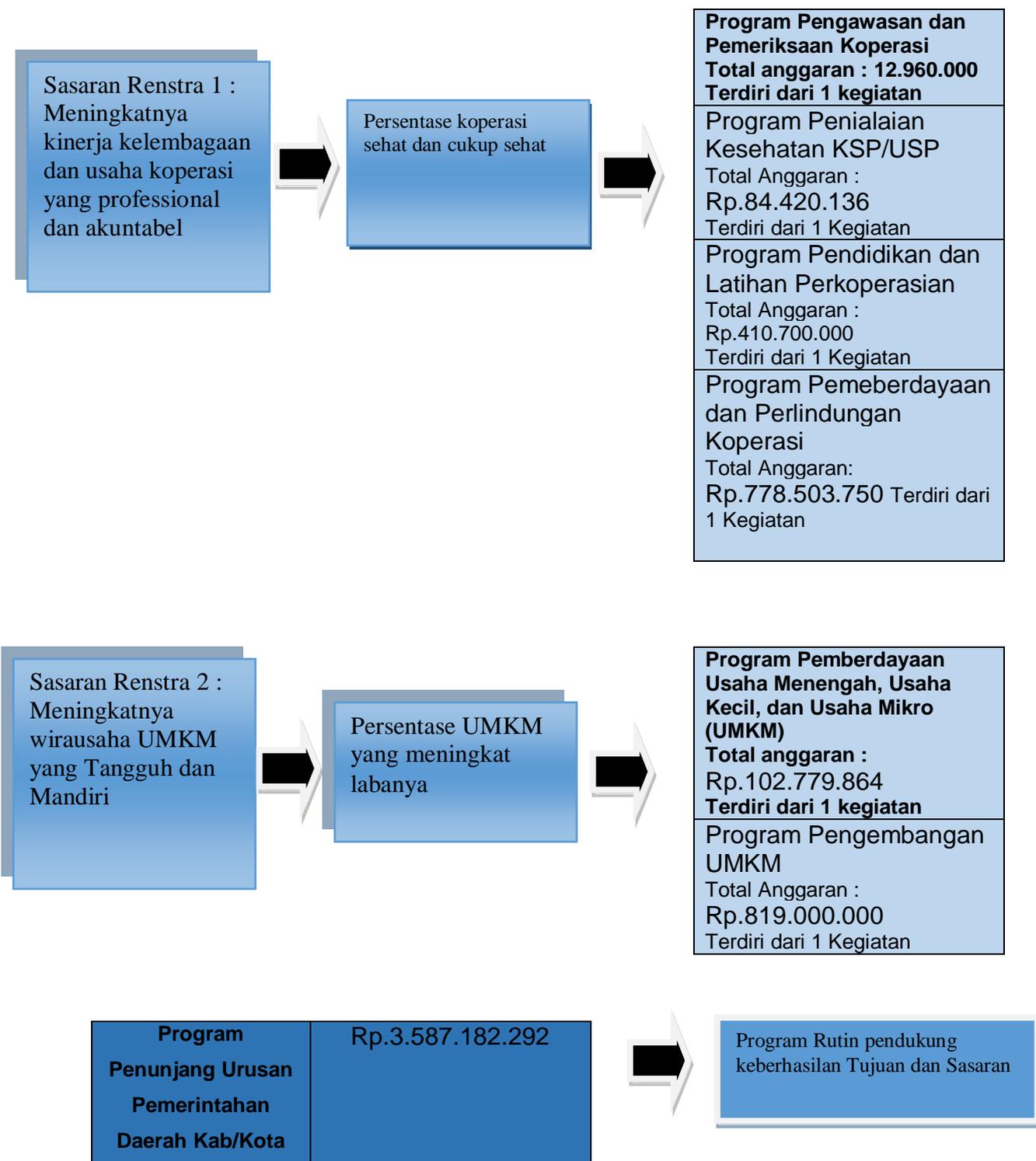


Gambar 1.3. CASCADING KINERJA
Keterkaitan RPJMD, Renstra, dan Indikator
Kinerja Tahun 2023



Gambar 1.4.

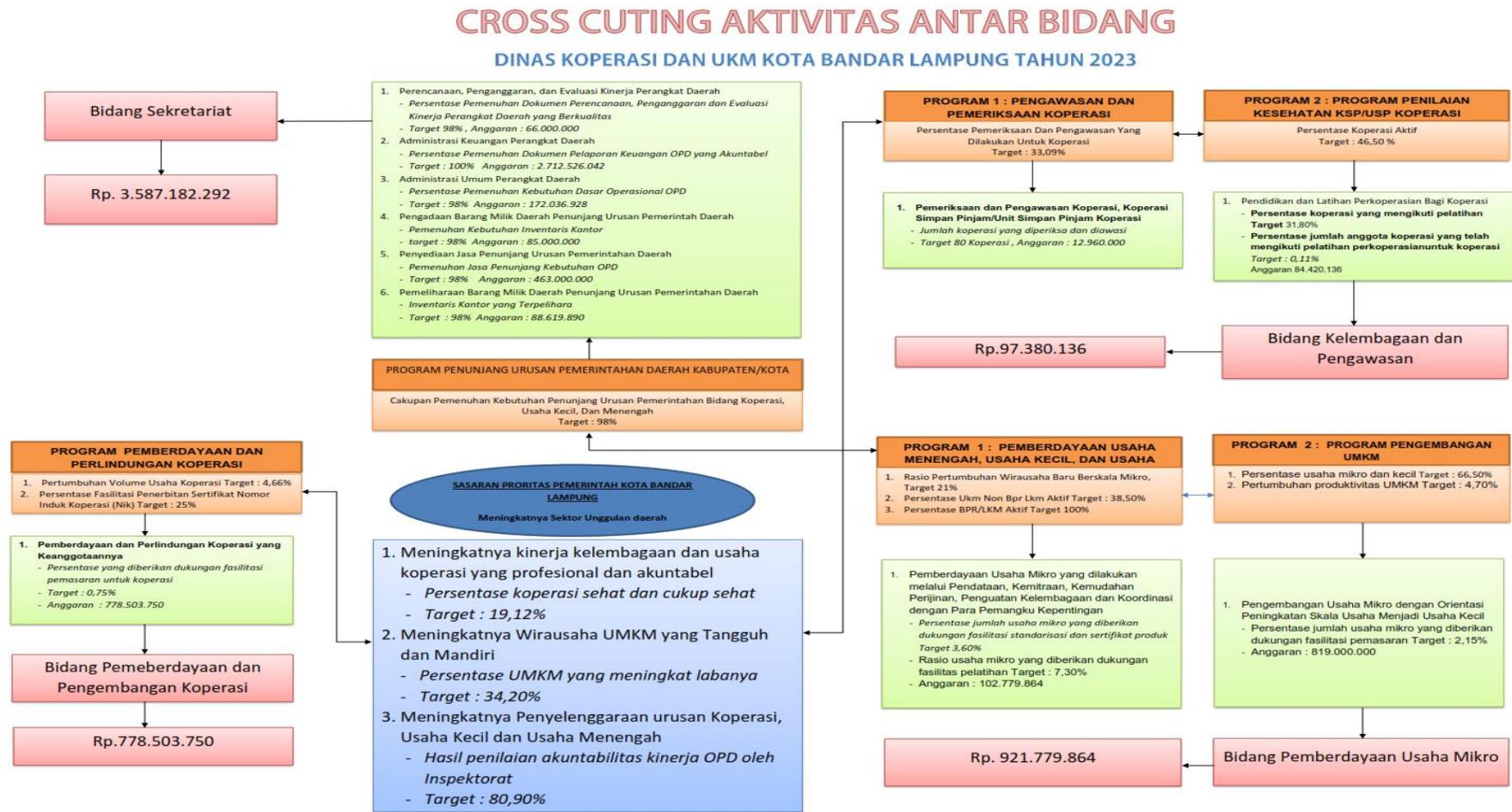
Program dan Anggaran yang mendukung IKU



1.9. CROSS CUTTING AKTIVITAS ANTAR BIDANG

Rencana kerja tiap level jabatan saling terkait, kinerja pada level jabatan yang dibawah (pelaksana) akan mendorong pencapaian kinerja pada level jabatan di atasnya (first line management). Selanjutnya, Rencana Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2023 pencapaian kinerja pada first line management akan mendorong pencapaian kinerja pada level middle management demikian seterusnya sampai akhirnya menjadi kinerja organisasi (top management). Perencanaan Kinerja disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan kesinambungan dan keselarasan peran antar bidang/fungsi dalam mewujudkan pencapaian suatu target kinerja. Artinya, dalam mencapai suatu target kinerja akan membutuhkan peran dari bidang-bidang (tidak hanya satu bidang), dimana masing-masing bidang menjalankan fungsi yang berbeda. Dengan demikian terdapat hubungan kinerja serta aktivitas antar bidang/tugas/fungsi dalam mewujudkan kinerja (crosscutting). Untuk menjelaskan hubungan ini disajikan gambar berikut:

Gambar 1.5. CROSS CUTTING DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG



1.10. PETA PROSES BISNIS

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung memiliki kewajiban untuk menyusun peta proses bisnis untuk menunjang tujuan beserta indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun maksud dari penyusunan proses bisnis ini adalah sebagai acuan OPD dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Sedangkan tujuan dari penyusunan proses bisnis ini bagi OPD adalah:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

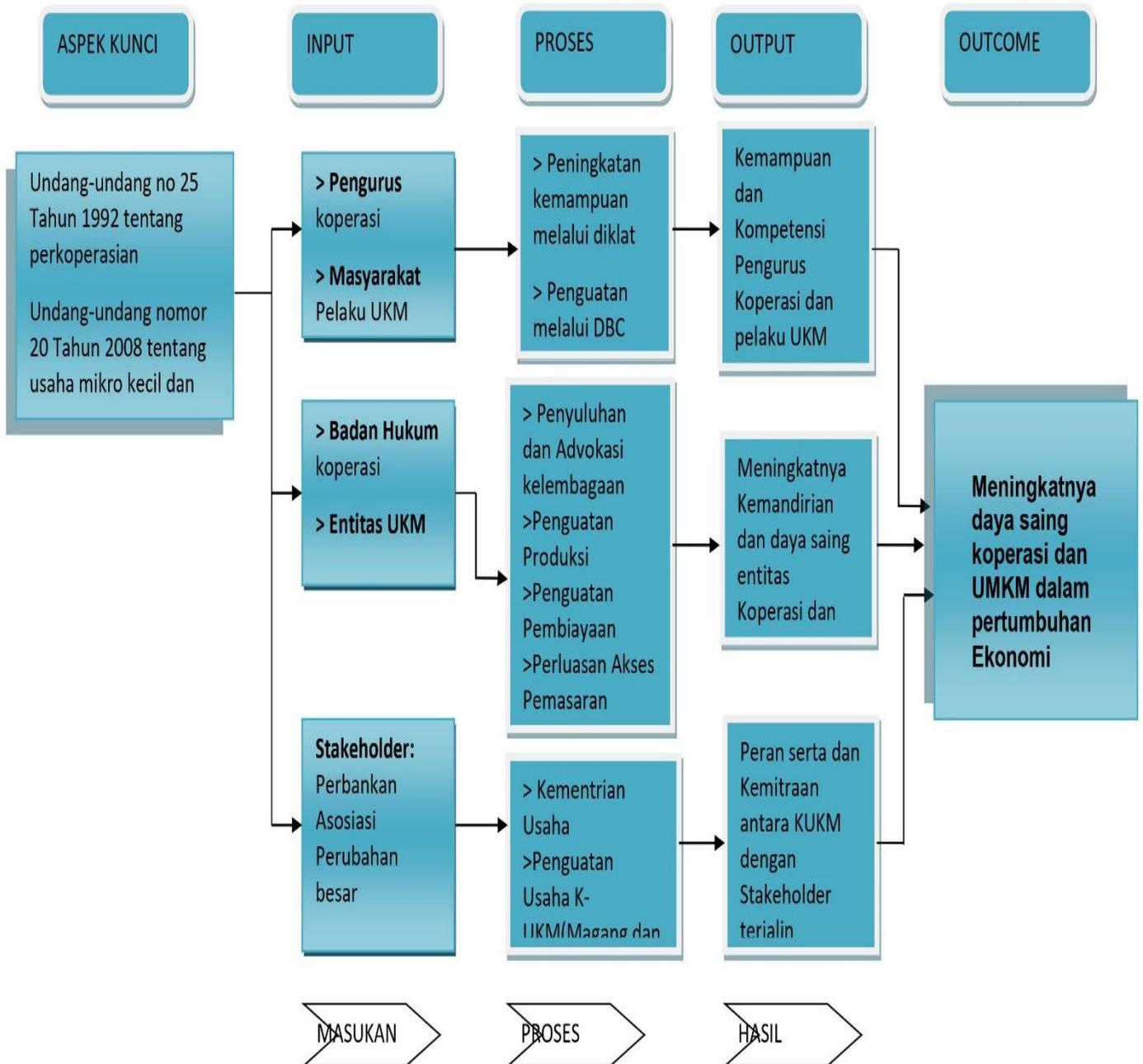
Adapun manfaat dari adanya peta proses bisnis ini bagi OPD adalah:

- a. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Berikut adalah peta proses bisnis pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada gambar 1.14 :

Gambar 1.6 PETA BISNIS DINAS KOPERASI DAN UKM

PETA BISNIS PADA DINAS KOPERASI UKM KOTA BANDAR LAMPUNG



Gambar 1.7. SOP TERKAIT PENYUSUNAN LAKIP DINAS KOPERASI DAN UKM

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	menerima surat dari Walikota dan memberikan arahan kepada Sekretaris untuk menyusun Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	Mulai				lembar disposisi, surat walikota ttg LAKIP	2 menit	disposisi	
2	menerima dan menyampaikan kepada Kasubbag untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)					lembar disposisi, surat walikota ttg LAKIP	10 menit	surat walikota ttg LAKIP	
3	menerima, menelaah dan memberi petunjuk kepada JFU untuk menyusun Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)					lembar disposisi, surat walikota ttg LAKIP, RPJMD, Renstra, Perda,	1 jam	surat walikota ttg LAKIP	
4	menginventarisir bahan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan berkoordinasi dengan bidang-bidang dan melaporkan kepada Kasubbag					data bidang-bidang, dokumen RPJMD, Renstra, RKT.	5 Hari	Bahan Laporan LAKIP	
5	menerima, menyusun, memaraf draft Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Sekretaris					data bidang-bidang, dokumen RPJMD, Renstra, RKT.	20 Hari	Bahan laporan LAKIP	
6	menerima, memeriksa, memaraf draft Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Kepala Dinas					Draft Laporan LAKIP	1 Hari	Draft Laporan LAKIP	
7	menerima, memeriksa dan menandatangani draft Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan menyampaikan kepada Walikota	Selesai				Draft Laporan LAKIP	1 Hari	Laporan LAKIP	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja mewujudkan komitmen kinerja yang telah disepakati tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (outcome) yang seharusnya terwujud atas kegiatan pada tahun sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung, bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah menetapkan Visi pembangunan Yaitu : ***“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, Dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat”*** Sedangkan Visi tersebut dituangkan kedalam 7 (tujuh) Misi, dimana Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mengacu pada Misi Ke-4 Yaitu :



Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung, yaitu : **“Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi”**

Pada tabel berikut dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dimana dalam setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur atas tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Tabel 2.1
Matriks Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran
Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat
		Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya
		Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat target kinerja yang telah ditetapkan selama lima tahun terakhir seperti pada table 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Kinerja beserta targetnya Tahun 2021-2026
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	16,96	18,11	19,12	20,34	21,53	21,53
		Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	26,30	31,50	34,20	39,49	44,70	44,70
		Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	80,50	80,70	80,90	81,10	81,30	81,50

Untuk Tahun 2023 Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam mencapai sasaran tersebut diatas mendapatkan 7 Program, 11 Kegiatan, dan 21 sub kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3.
Program/kegiatan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kinerja
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM dalam pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	19,12%	1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan kewenangan kabupaten/kota
					2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
					3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
					4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai

					PERLINDUNGAN KOPERASI	keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Provinsi
		Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro
					6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

2.2. INDIKATOR KUNCI UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	FORMULA/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat / jumlah seluruh koperasi X 100%	Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkatkan labanya	Persentase UMKM yang meningkat labanya	Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung
3	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah menyusun rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan tujuan :

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan RKPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung selama tahun 2023.

Berikut tabel Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tahun 2023 :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	1. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	19,12%	1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	33,09%
				Kegiatan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	80 Koperasi
				Sub kegiatan pemeriksaan kepatuhan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang memenuhi perundang-undang koperasi kewenangan kabupaten/kota	50 Koperasi
				2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	46,50%

			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	32,69%
			<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	80 Koperasi
2			3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Jumlah anggota Koperasi	0,36%
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	31,80%
			<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang
			4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha koperasi	4,66%
				Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	25%
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	0,75%
			<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Provinsi</i>	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk ditingkatkan manajemen produksinya, standarisasinya, perlindungan usahanya dan restrukturisasi usahanya	50 Orang

2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	21%
					Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	38.50%
					Persentase BPR/LKM Aktif	100%
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	3,60%
					Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	7,30%
				<i>Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro</i>	Jumlah kecamatan yang tersedia kredit ekonomi kerakyatan	20 orang
				6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil	66,50%
					Pertumbuhan produktivitas UMKM	4.70%
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,15%
				<i>Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	Jumlah UKM yang difasilitasi melalui pameran, penyediaan jaringan informasi pasar, dan sarana promosi produk UKM	30 Unit Usaha

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian Penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

**Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	%	19,12
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	%	34,20
3	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	Nilai	80,90

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

**3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP
TAHUN SEBELUMNYA**

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Nilai Lakip untuk Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diperoleh dari laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 700.370.II.02.2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

Tabel 3.1
Tabel nilai hasil evaluasi LKIP
Dinas Koperasi dan UKM s/d Tahun 2022

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022
1	Perencanaan kinerja	30%	27,31%	24,30%	24,30%
2	Pengukuran kinerja	25%	19,06%	21,00%	21,00%
3	Pelaporan kinerja	15%	10,88%	10,50%	12,30%
4	Evaluasi kinerja	10%	8,43%	17,50%	18,75%
5	Capaian kinerja	20%	14,69%	-	-
	Nilai hasil evaluasi	100%	80,37%	73,31%	76,35%
	Tingkat akuntabilitas kinerja		A	B+	B+

2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bontang Terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat terhadap LKIP Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat diuraikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.2
Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2022

No.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1.	<p>Perencanaan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat dipublikasikan melalui Website resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan tepat waktu sehingga dapat diakses oleh publik secara transparan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik - Melakukan perbaikan dokumen perencanaan secara berkala di setiap level organisasi agar besaran target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja (Renstra 2021-2026) dan LAKIP 2022 besaran nilainya sama pada Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM, sehingga kualitas indikator kinerja memenuhi kriteria yang SMART - Agar Dinas Koperasi dan UKM membuat aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) 	<ul style="list-style-type: none"> - Telah mempublikasikan dokumen Lakip ke dalam website Pemerintah Kota Bandar Lampung. - Melakukan perbaikan dokumen secara berkala dan terwujud kualitas indikator kinerja yang SMART. - Dinas Koperasi sudah membuat Crosscutting 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas koperasi dan UKM akan mempublikasikan dokumen LAKIP dengan tepat waktu. - Perbaikan Dokumen perencanaan secara berkala
2.	<p>Pengukuran Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar Dinas Koperasi dan UKM Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa SOP 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Koperasi dan UKM akan menyusun SOP dalam pengumpulan Data kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat SOP berkaitan dengan pengumpulan

	<p>Pengumpulan Data Kinerja Per Perjanjian Kinerja dengan tepat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun mekanisme terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan secara jelas berupa SOP Pengumpulan Data Kinerja Per Perjanjian Kinerja dengan tepat waktu. 	dengan tepat waktu	data Kinerja
3.	<p>Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pelaporan Kinerja yang telah memenuhi standar agar dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas koperasi dan UKM memberikan Laporan Kinerja yang akuntabel dan melaksanakan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menginfokan tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja, analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi kedepan yang dilakukan
4.	<p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agar seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat ditindaklanjuti, sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal akan ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi telah ditindaklanjuti.

3. Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan

Capaian Kinerja untuk tiap 3 bulan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Tabel Capaian Kinerja Triwulan Dinas Koperasi dan UKM
Kota Bandar Lampung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Satuan	Target Tahunan	TW	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	Persen	19,12	I	0	0	0
					II	0	0	0
					III	0	0	0
					IV	19,12	20,88	109,21
2	Meningkatnya wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	Persen	34,20	I	0	0	0
					II	0	0	0
					III	0	0	0
					IV	34,20%	34,20%	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan usaha menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat kota (Nilai SAKIP OPD)	Nilai	80,90	I	0	0	0
					II	0	0	0
					III	0	0	0
					IV	80,90	Belum dinilai	0

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa triwulan 1 s.d triwulan 3 capaian masih nol (0) karena perhitungan indikator dapat dihitung di triwulan 4, triwulan 4 ada 2 indikator nilai >50.

3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja Strategis dan Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dengan nilai capaian Kinerja Sasaran dikelompokkan dalam skala pengukur ordinal sebagai berikut:

85 % s/d 100 % : Sangat Baik

70 % s/d <85 % : Berhasil

55 % s/d <70 % : Cukup Baik

<55 % : Tidak Baik

Hasil pengukuran atas capaian Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	19,12%	20,88%	109,21%	Sangat Baik
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	34,20%	100%	Sangat Baik
Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Nilai Sakip OPD)	80,90 Skor	-	-	Belum dinilai

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis pada akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Persentase koperasi sehat dan cukup sehat, dengan capaian kinerja
- Persentase UMKM yang meningkat labanya, dengan capaian kinerja

Dari uraian singkat diatas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bandar Lampung telah mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan sektor unggulan Daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan di tahun – tahun sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja pada 2023 dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya :

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Sasaran Tahun 2023
(dibandingkan tahun sebelumnya)

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Tahun		Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2023 terhadap capaian tahun 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	16,09%	18,83%	19,12%	20,88%	109,21%	110,88%
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	22,64%	30,54%	34,20%	34,20%	100%	111,98%

Sedangkan tabel berikut merupakan perbandingan kinerja pada 2023 dibandingkan dengan target pada akhir tahun Renstra 2021 – 2026.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator tahun ini
Dengan target akhir periode renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target akhir Renstra (2026)	Realisasi s/d 2023 terhadap akhir renstra Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	19,12%	20,88%	109,21%	21,53%	96,98%
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	34,20%	100%	44,70%	76,51%

Tabel 3.7
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kota Bandar Lampung	Realisasi Provinsi Lampung	Realisasi Nasional
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	20,88%	34,26%	-
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	-	-

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, diketahui bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tidak ada yang terkait dengan standar nasional sehingga perbandingan realisasi kinerja tidak dapat dilaporkan dan disajikan lebih lanjut.

✚ **ADAPUN ANALISIS TIAP-TIAP INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023 DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG DAPAT DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT :**

SASARAN 1 :
MENINGKATNYA KINERJA KELEMBAGAAN DAN USAHA KOPERASI YANG PROFESSIONAL DAN AKUNTABEL”

Sasaran meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi yang Profesional dan Akuntabel memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat.

Indikator sasaran “ Persentase Koperasi Sehat dan cukup sehat”

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

“(Jumlah koperasi sehat / Seluruh jumlah koperasi) x 100%”

**Capaian Indikator Kinerja
 Persentase koperasi sehat dan cukup sehat Tahun 2023**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	19,12%	20,88%	109,21%	Sangat baik

Indikator yang pertama adalah persentase koperasi sehat dan cukup sehat .Pada Tahun 2023 dari total jumlah koperasi yang ada sebanyak 409 unit koperasi dan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak 85 unit koperasi. Sedangkan pada tahun 2022 jumlah koperasi yang ada sebanyak 393 unit koperasi dengan jumlah koperasi sehat dan cukup sehat sebanyak

74 unit koperasi, sehingga terdapat kenaikan 11 unit koperasi sehat dan cukup sehat dari tahun 2022.

**Capaian Indikator Persentase koperasi sehat dan cukup sehat
Tahun 2023 (dibandingkan tahun sebelumnya)**

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Tahun		Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2023 terhadap capaian tahun 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	16,09	18,83	19,12	20,88%	109,21%	110,88%

Capaian indikator persentase koperasi sehat dan cukup sehat Tahun 2023 dibandingkan capaian tahun 2022 mencapai kemajuan sebesar 110,88% dengan realisasi capaian tahun 2022 sebesar 18,83% dan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 20,88%

Perbandingan Capaian Indikator Persentase koperasi sehat dan cukup sehat tahun ini Dengan target akhir periode renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target akhir Renstra (2026)	Realisasi s/d 2022 terhadap akhir renstra Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	19,12%	20,88%	109,21%	21,53%	96,98%

Capaian Koperasi sehat dan cukup sehat Tahun 2023 sebesar 109,21% dari realisasi koperasi sehat dan cukup sehat tahun 2023 sebesar 20,88% jika dibandingkan terhadap target akhir Renstra (21,53%) maka capaian akhir Restra sebesar 96,98%

Adapun parameter yang digunakan untuk menghitung persentase koperasi sehat dan cukup sehat adalah koperasi tersebut menjalankan usahanya dengan baik, yaitu dari sisi kelembagaan maupun manajerial sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian yaitu dituangkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang selanjutnya digunakan dalam proses perolehan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Capaian indikator ini didukung oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini difokuskan pada Peningkatan kualitas kelembagaan dan pengelolaan koperasi. Kegiatan-kegiatan didalamnya berupa pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.

Upaya-upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut diantaranya adalah

- Penilaian kesehatan koperasi 80 koperasi
- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi berupa forum komunikasi dan temu kemitraan.
- Fasilitasi akta notaris untuk pembentukan badan hukum koperasi, penataan koperasi,
- Pembinaan kelembagaan koperasi sehingga dapat sepenuhnya mengimplementasikan jati diri koperasi,
- Memasyarakatkan koperasi sehingga masyarakat khususnya UKM tertarik untuk berkoperasi, serta memberikan apresiasi pada koperasi dan UKM yang berkualitas.
- Penginputan laporan RAT Koperasi

- Menindaklanjuti pengawasan pada koperasi bermasalah
- Memberikan sertifikat koperasi berprestasi

2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian,

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi sehingga pengelolaan koperasi dan UKM semakin berkualitas dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas koperasi tersebut. Kegiatan didalamnya yaitu Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM koperasi.

Upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut diantaranya

- Pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi koperasi
- Penyusunan modul pembelajaran bagi koperasi.
- pelatihan berbasis kompetensi berupa pelatihan Peningkatan kapasitas pengurus koperasi, Pelatihan perkoperasian bagi kelompok usaha produktif, pelatihan manajemen usaha kecil, pelatihan pemasaran online,packaging dan branding produk UKM.

3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

Program ini difokuskan untuk pengembangan koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi, Peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi.

Kegiatan didalamnya yaitu Pemberdayaan Peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi.

Upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut

- Pembenahan kembali struktur usaha koperasi yang mengalami kemacetan
- Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha koperasi
- Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam koperasi

- Fasilitasi pembinaan untuk menyusun pelaporan keuangan dan rencana bisnis untuk koperasi
- Penguatan usaha syariah melalui KSP dan pembiayaan syariah
- Melakukan monitoring untuk pemberdayaan koperasi
- FGD yang bertujuan menjangkau apresiasi para pelaku koperasi
- Pengawasan koperasi di Kota Bandar Lampung

Permasalahan yang menjadi hambatan/kendala adalah :

1. Kurangnya jumlah SDM untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi.
2. Belum optimalnya jaringan kerjasama antar koperasi, baik secara vertical maupun horizontal.
3. Masih ada beberapa koperasi yang belum melaksanakan RAT
4. Masih banyak koperasi yang hanya mengandalkan aturan main pada Anggaran Dasar, belum melengkapi dengan Anggaran Rumah Tangga maupun Peraturan Khusus.
5. Sebagian besar koperasi belum memiliki visi untuk modern dari segi SDM, kelembagaan, usaha dan inovasi.
6. Belum maksimalnya laporan keuangan koperasi.

Solusi dalam pemecahan masalah :

1. Pembinaan yang berkesinambungan, bersinergi dan koordinatif telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi, antara lain dengan pelaksanaan program yang terarah dan tepat sasaran dengan implementasi kegiatan-kegiatan yang terfokus. Di bidang organisasi, manajemen, usaha, dan keuangan koperasi, serta pelayanan badan hukum koperasi.
2. Menginventarisasi berbagai masalah yang ada untuk didiskusikan bersama dalam rapat dengan pejabat struktural dan staf, sehingga siapapun yang ditugaskan ke lapangan kapasitasnya adalah mewakili Dinas.

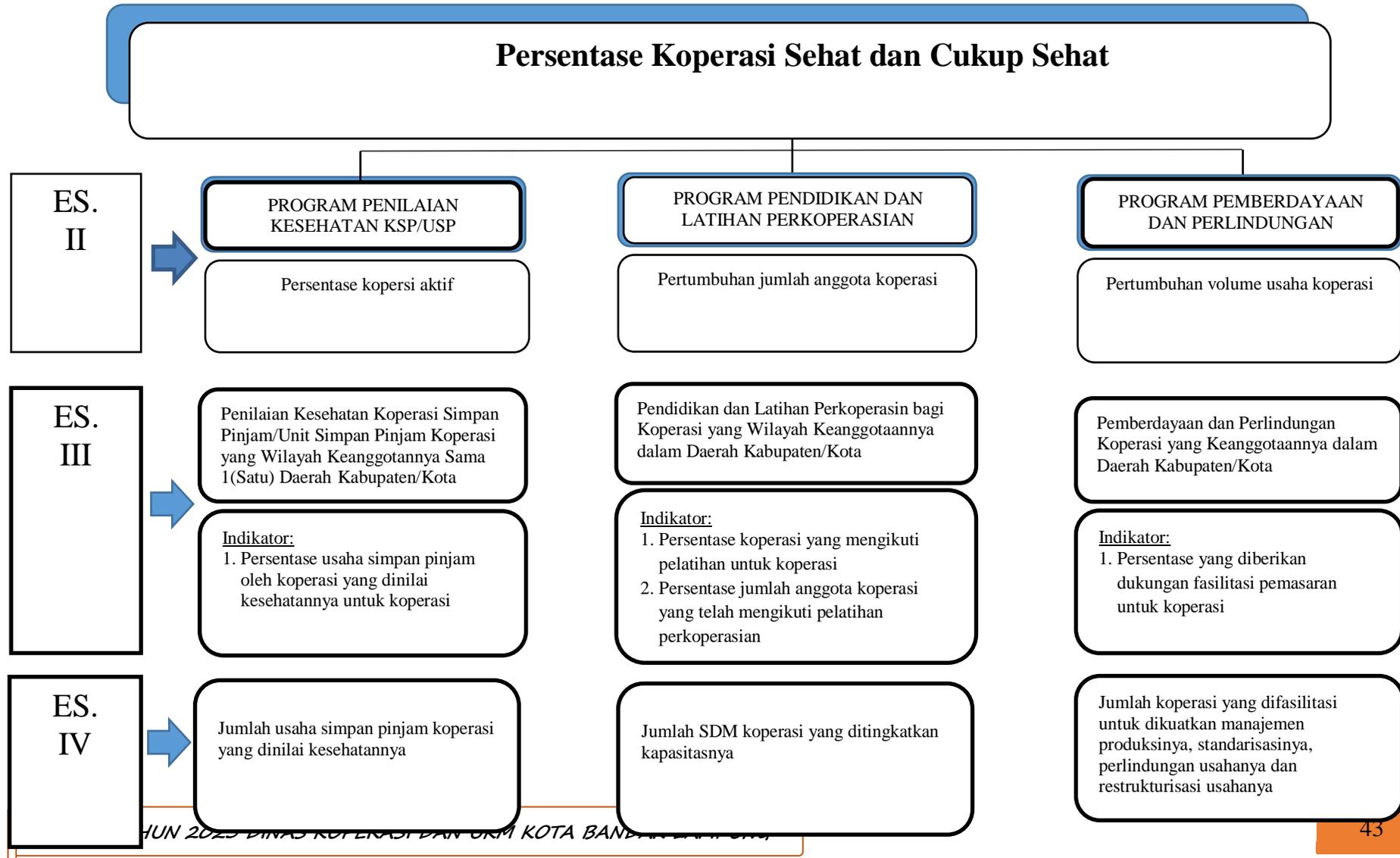
3. Dinas membuat panduan secara tertulis dan berbagai kebijakan sebagai bekal bagi petugas lapangan untuk turun lapangan
4. Meningkatkan kualitas koperasi adalah dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan meningkatkan kinerja usaha koperasi.
5. Pembinaan penyusunan standar laporan keuangan koperasi

Tabel 3.8.
Tabel Perbandingan Capaian Koperasi Sehat
Tahun 2015 s/d 2023

Tahun	Perbandingan		
	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Sehat
2015	723	313	18
2016	740	355	20
2017	741	313	23
2018	744	158	30
2019	662	167	40
2020	664	176	55
2021	410	194	66
2022	393	146	74
2023	409	160	85

Data Koperasi sehat dapat dilihat di website Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Website ://diskopukm.bandarlampungkota.go.id

Gambar 1.8. Cascading program/kegiatan dalam upaya mencapai target Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat



SASARAN 2 :

MENINGKATNYA WIRAUSAHA UMKM YANG TANGGUH DAN MANDIRI”

Sasaran meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase UMKM yang meningkat labanya.

Indikator sasaran “ Persentase UMKM yang Meningkatkan Labanya”

Adapun formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut :

“(Jumlah UMKM yang meningkat labanya / jumlah UMKM dalam pengawasan) x 100%”

Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 Persentase UMKM yang meningkat labanya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Skala Nilai
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	34,20%	100%	Sangat Baik

Indikator yang kedua adalah Persentase UMKM yang meningkat labanya dengan capaian sebesar 100%. Jumlah UMKM yang meningkat labanya pada tahun 2023 sebanyak 650 UMKM dengan jumlah UMKM dalam pengawasan sebanyak 1.899 UMKM. Sampai dengan tahun 2023 Jumlah UMKM yang meningkat labanya sebanyak 650 unit usaha sedangkan sampai dengan Tahun 2022 jumlah UMKM yang meningkat labanya sebanyak 580 unit usaha sehingga ada kenaikan sebesar 70 unit sampai dengan tahun 2023.

**. Capaian Indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya
Tahun 2023 (dibandingkan tahun sebelumnya)**

Sasaran	Indikator sasaran	Capaian Tahun		Capaian Tahun 2023			Capaian Tahun 2023 terhadap capaian tahun 2022
		2021	2022	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	22,64%	96,96%	34,20%	34,20%	100%	111,98%

Pada Tahun 2023 Target indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya sebesar 34,20% terealisasi sebesar 34,20% sehingga capaian persentase 100%.

Untuk capaian tahun 2023 dibandingkan terhadap capaian tahun 2022 maka persentase UMKM yang meningkat labanya sebesar 111,98% dari capaian tahun 2023 sebesar 34,20% sedangkan di tahun 2022 capaian sebesar 96,96%.

Perbandingan Capaian Indikator Persentase UMKM yang meningkat labanya tahun ini Dengan target akhir periode renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target akhir Renstra (2026)	Realisasi s/d 2023 terhadap akhir renstra Tahun 2026 (%)
		Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	34,20%	100%	44,70%	76,51%

Apabila capaian indikator persentase UMKM yang meningkat labanya tahun ini dibandingkan pada akhir renstra tercapai sebesar 76,51% dari target akhir

renstra sebesar 44,70%. Tingkat kemajuan yang ditunjukkan oleh persentase UMKM yang meningkat labanya pada tahun ini 34,20% sudah mendekati target akhir Renstra dan sekitar 44,70%

Keberhasilan capaian ini didukung oleh :

- Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung perkembangan UMKM di Kota Bandar Lampung berupa penguatan modal usaha yaitu pinjaman modal usaha dengan bunga 0 persen bekerjasama dengan Bank mandiri.
- Pemerintah Kota bandar Lampung memfasilitasi pelaku usaha untuk mempromosikan produk UMKM melalui Bazar Wisata Kuliner di Taman UMKM Bung Karno yang diadakan pada hari sabtu dan Minggu di Jl.Gatot Subroto Kota Bandar Lampung
- Fasilitasi pemasaran offline dan online yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terhadap pelaku usaha yang ada di Kota Bandar Lampung
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan toko/swalayan untuk melakukan pemasaran produk-produk UMKM
- Fasilitasi keikutsertaan UMKM dalam berbagai event pameran dalam daerah maupun di luar daerah
- Penyaluran Dana Bergulir Pemerintah Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan Bank Waway yang diperuntukan bagi UKM, selain itu juga terdapat pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan program pemerintah dalam memberikan kredit dengan bunga ringan bagi UMKM. Tujuan KUR adalah memberikan akses kredit kepada pengusaha kecil dan menengah yang selama ini tidak bias mengambil kredit ke perbankan.

Capaian indikator ini didukung juga oleh beberapa program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk yang

dihasilkan oleh UKM. Kegiatan-kegiatan didalamnya berupa pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

Upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut :

- Fasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal dan PIRT sebanyak 31 unit usaha.
- Fasilitasi pelaku UKM dalam mengikuti pelatihan UMKM sebanyak 50 unit usaha
- Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan melalui Pinjaman Ekonomi Kerakyatan melalui PD.Bank Waway Kota Bandar Lampung, kemitraan dengan BUMN.
- Fasilitasi pendaftaran HKI kepada UMKM sebanyak 60 UKM sehingga mendorong UMKM menghasilkan produk dan proses yang bersifat kreatif dan inovatif.
- Fasilitasi penerbitan sertifikat halal sebanyak 60 UKM.
- Fasilitasi penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) bagi UMKM sebanyak 179 UKM
- Fasilitasi kepada UKM produktif untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dengan bunga 0%.

2. Program Pengembangan UKM

Dua program tersebut bertujuan untuk memfasilitasi UKM dalam memasarkan produk-produk UMKM.

Kegiatan-kegiatan didalamnya berupa Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi

Upaya yang dilakukan melalui kegiatan tersebut :

- Fasilitasi pemasaran tidak hanya melalui Bazar dan galeri , namun juga fasilitasi mengikuti pameran-pameran dalam daerah dan luar daerah sebanyak 6 kali untuk mengikuti promosi produk UMKM sebanyak 32 UKM.

- Melakukan perluasan pasar produk-produk UMKM melalui Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Grab, Gojek, dan Blibli dalam mengembangkan e-commerce bagi pemasaran produk UMKM
- Perluasan akses pemasaran juga dilakukan melalui fasilitasi kemitraan UKM.
- Memfasilitasi pelaku UKM dalam membantu layanan desain kemasan sebanyak 39 UKM

Tabel 3.9.
Jumlah UMKM yang meningkat labanya
Kota Bandar Lampung Tahun 2020 s/d 2022

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah UMKM yang meningkat labanya	400	430	580	650
Jumlah UMKM yang dalam pengawasan	1.899	1.899	1.899	1.899
Persentase UMKM yang meningkat labanya	21,06	22,64	30,54	34,20

Permasalahan yang menjadi hambatan/kehalangan adalah :

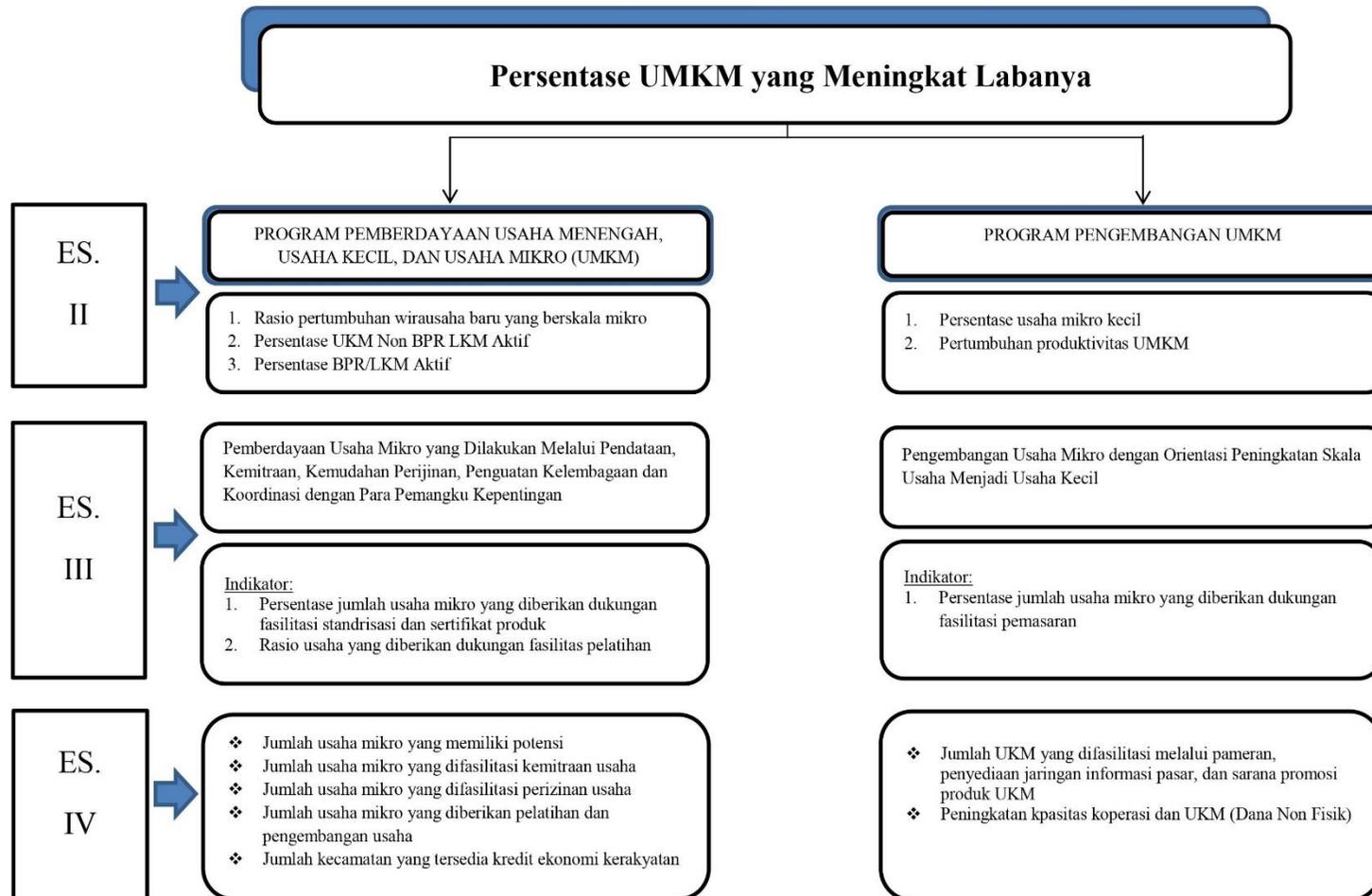
- ❑ Belum optimalnya dukungan, kerjasama, kemitraan dan koordinasi dengan pihak terkait untuk pengembangan UMKM
- ❑ Masih kurangnya fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi pelaku koperasi UKM.
- ❑ Sebagian besar produk UMKM belum dapat melakukan penetrasi pasar karena lemahnya daya saing.
- ❑ Kurangnya jumlah SDM untuk melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan kepada pelaku usaha.

Adapun Langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

- ❑ Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung melakukan pembinaan berupa diklat, bimtek, pemasaran dan pendampingan kepada UMKM.

- ❑ Fasilitasi penguatan modal melalui kemitraan dengan Perbankan KUR, Bank Waway Kota Bandar Lampung.
- ❑ Fasilitasi pendaftaran HKI kepada UMKM sehingga mendorong UMKM menghasilkan produk dan proses yang bersifat kreatif dan inovatif.
- ❑ Meningkatkan jejaring usaha/kemitraan.
- ❑ Perlunya kaderisasi terhadap pengurus dan pengawas UMKM.
- ❑ Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal.

Gambar 1.9. Cascading Program/Kegiatan Dalam Upaya Mencapai Target Persentase UMKM Yang Meningkatkan Labanya



**SASARAN 3 :
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN URUSAN KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 1 (satu) indikator yaitu Hasil Penilaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Indikator sasaran “ Hasil Penilaian Kinerja Akuntabilitas Kinerja OPD oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung”

**Tabel 3.10.
Penghitungan Pencapaian Sasaran Dua**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Hasil penilaian Lakip oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Predikat LAKIP)	73,31	76.35	80,90	-	Belum ada penilaian

Pada tabel dijelaskan bahwa indikator Hasil penilaian Lakip oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Predikat LAKIP) pada tahun 2022 realisasi 76.35 skor. Untuk tahun 2023 Hasil penilaian Lakip oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Predikat LAKIP) dengan target 80,90 skor dan realisasi tahun 2023 belum ada penilaian.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 (tiga), Hasil penilaian Lakip oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung (Predikat LAKIP) dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evauasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian indikator predikat LAKIP belum dapat disampaikan hasilnya karena masih menunggu penilaian lebih lanjut.

ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja untuk untuk 2 (dua) sasaran dapat dilaksanakan melalui 7 program, 11 kegiatan, dan 21 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja kegiatan 100%. Realisasi program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2023 **dengan total anggaran Rp.5.795.016.042,- dan realisasi Rp.4.265.063.339 (73,60%)** dilaksanakan melalui 7 program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. **Program “Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”** yang didukung dengan 7 (tujuh) kegiatan dengan total jumlah Anggaran Rp. 3.587.182.292 dan terserap Rp.3.012.450.332 Atau sebesar (83.98%)

Adapun Capaian kinerja program berupa :

- Cangkupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Target 98% realisasi 98% dengan tingkat capaian 100%

Adapun Kegiatan Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pendukung yaitu sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dengan jumlah Anggaran Rp.66.000.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.64.000.000 atau (96,97%) dengan hasil yang dicapai yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja 5 laporan.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Tahun 2023 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung oleh 2 sub kegiatan :

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah Anggaran Rp.2.592.366.042 dengan Realisasi Keuangan Rp.2.187.336.216 atau (84,38%) dengan hasil yang dicapai yaitu jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 26 orang/bulan.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD dengan jumlah Anggaran Rp.120.160.000 realisasi Rp.87.780.000 (73,05%) dengan hasil yang dicapai yaitu jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 1 dokumen.

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah

Pada Tahun 2023 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah didukung oleh 1 sub kegiatan :

- Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perengkapan kantor dengan jumlah Anggaran Rp. 25.636.928 dengan Realisasi Keuangan Rp.25.266.002 atau (98,55%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah paket peraltan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 paket.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan jumlah Anggaran Rp.3.000.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.2.961.066 atau (98,70%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah paket peraltan rumah tangga yang disediakan 1 paket.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan jumlah Anggaran Rp. 11.000.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.11.000.000 atau (100%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 1 paket.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan jumlah Anggaran Rp. 27.000.000 dengan Realisasi

Keuangan Rp.26.603.000 atau (98,53%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 paket.

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dengan jumlah Anggaran Rp. 5.400.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.5.400.000 atau (100%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 1 dokumen.
- Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD dengan jumlah Anggaran Rp. 100.000.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.53.931.901 atau (53,93%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 1 laporan.

(4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2023 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh 1 sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan jumlah Anggaran Rp. 85.000.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.83.000.000 atau (97,65%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah pengadaan sarana dan prasarana 4 unit.

(5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2023 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh 2 sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan jumlah Anggaran Rp. 71.000.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.17.100.257 atau (24,08%) dengan hasil

yang dicapai yaitu Jumlah paket mebel yang disediakan 12 laporan.

(6) Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada Tahun 2023 Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didukung oleh 3 sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan jumlah Anggaran Rp.33.532.088 dengan Realisasi Keuangan Rp.33.351.500 atau (99,46%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 unit.
- Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan jumlah Anggaran Rp.50.087234 dengan Realisasi Keuangan Rp.45.970.390 atau Rp.45.970.390 (91,78%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 5 unit.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan jumlah Anggaran Rp. 5.000.000 dengan Realisasi Keuangan Rp4.750.000 atau (95%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 5 unit.

2. **Program “Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi”** yang didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dengan total Jumlah Anggaran Rp. 12.960.000 dan terserap Rp.0 atau sebesar (%)

Adapun Capaian kinerja program berupa :

- Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi target tahun 2023 adalah 33,09% terealisasi 22% tingkat capaian realisasi 66,50%

Adapun Kegiatan pendukung Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yaitu sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2023 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 sub kegiatan :

- Sub Kegiatan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah Anggaran Rp.12.960.000 dengan Realisasi Keuangan Rp.0 atau (0%) dengan hasil yang dicapai yaitu jumlah koperasi yang mematuhi perundang-undangan koperasi kewenangan Kabupaten/kota 5 unit usaha.

3. Program “Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi” yang didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dengan total Jumlah Anggaran Rp.84.420.136,00 dan terserap Rp.79.405.800 atau sebesar (94,06%)

Adapun Capaian kinerja program berupa :

- Persentase koperasi aktif target Tahun 2023 adalah 46,50% terealisasi 39,11% tingkat capaian realisasi 84,11%

Adapun Kegiatan pendukung Program Penilaian KSP/USP Koperasi yaitu sebagai berikut :

(1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2023 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 Sub Kegiatan.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan jumlah Anggaran Rp.84.420.136,00 dengan Realisasi Keuangan Rp.79.405.800 atau (94,06%) dengan hasil yang dicapai yaitu jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan ada 80 unit usaha.

4 Program " Pendidikan dan Latihan Perkoperasian" yang didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dengan total Jumlah Anggaran Rp. 410.170.000,00 dan terserap Rp.393.742.200 atau (95,99%).

Adapun capaian kinerja program berupa :

- Pertumbuhan jumlah anggota koperasi target sampai dengan tahun 2023 adalah 0,36% terealisasi -15,13% tingkat capaian realisasi -4202,37%

Adapun Kegiatan pendukung Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian yaitu sebagai berikut :

1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun 2023 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 Sub Kegiatan.

- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan jumlah anggaran Rp.410.170.000,00 dengan Realisasi Keuangan Rp.393.742.200 atau (95,99%) dengan hasil yang dicapai yaitu jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian ada 100 orang.

5 Program “Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi” yang didukung dengan 1 (satu) Kegiatan dengan total Jumlah Anggaran Rp.803.503.750 dan terserap Rp. atau (%).

Adapun Capaian kinerja program berupa :

- Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi target sampai dengan tahun 2023 adalah 4,66% terealisasi 3,38% tingkat capaian realisasi 72,50%
- Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) target sampai dengan tahun 2023 adalah 25% terealisasi 24,69% tingkat capaian realisasi 98,78%.

Adapun Kegiatan pendukung Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yaitu sebagai berikut :

(1) Kegiatan *Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Kesanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*

Pada Tahun 2023 Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh 1 Sub Kegiatan.

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi dengan jumlah Anggaran Rp.778.503.750 dengan Realisasi Keuangan Rp.80.467.252 atau (10,34%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 40 Orang.

6. Program “Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)” yang didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan total jumlah anggaran Rp.102.779.864 dan terserap Rp.80.180.800 atau (78,01%).

Adapun Capaian kinerja program berupa :

- Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro target sampai dengan tahun 2023 adalah 21% terealisasi 18,43% tingkat capaian realisasi 87,76%
- Persentase UKM Non BPR LKM Aktif target sampai dengan tahun 2023 adalah 38,50% terealisasi 33,49% tingkat capaian realisasi 87%
- Persentase BPR/LKM Aktif target sampai dengan tahun 2023 adalah 100% terealisasi 100% tingkat capaian realisasi 100%

Adapun Kegiatan pendukung Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Pada Tahun 2023 Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan didukung oleh Sub-sub Kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dengan jumlah Anggaran Rp.102.779.864 dengan Realisasi Keuangan Rp.80.180.800 atau (78,01%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro 30 Orang.

7 Program " Pengembangan UMKM" yang didukung dengan 1 (satu) kegiatan dengan total jumlah anggaran Rp. 659.000.000,00 dan terserap Rp. atau (%).

Adapun capaian kinerja program berupa :

- Persentase usaha mikro dan kecil target sampai dengan tahun 2023 adalah 66,50% terealisasi 91,35% tingkat capaian realisasi 137,38%
- Pertumbuhan produktivitas UMKM target sampai dengan tahun 2023 adalah 4,70% terealisasi 6,97% tingkat capaian realisasi 148,20%

Adapun kegiatan pendukung Program Pengembangan UMKM yaitu sebagai berikut :

1)Kegiatan *Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil*

Pada Tahun 2023 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil didukung oleh sub-sub kegiatan yaitu:

- Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi dengan jumlah anggaran Rp.819.000.000,00 dengan realisasi keuangan Rp.618.816.955 atau (75,56%) dengan hasil yang dicapai yaitu Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi sebanyak 50 unit usaha (100%)

Tabel 3.11.
Program dan Kegiatan untuk Pencapaian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target	%
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	1. Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat	19,12%	1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	33,09%	22%
				Kegiatan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	80 Koperasi	80 Koperasi
				Sub kegiatan pemeriksaan kepatuhan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang memenuhi perundang-undang koperasi kewenangan kabupaten/kota	50 Koperasi	50 Koperasi
				2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	46,50%	39,11%
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dama 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	32,69%	24,45%
				<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	80 Koperasi	80 Koperasi
2				3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pertumbuhan Jumlah anggota Koperasi	0,36%	-15,13%
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wiilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi	31,80%	22%

					Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan pekoperasi	0,11%	0,14%	
					<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya	100 Orang	100 Orang
				4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pertumbuhan volume usaha koperasi	4,66%	3,38%	
					Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	25%	24,69%	
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi	0,75%	1,47	
				<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, dan Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha koperasi Kewenangan Provinsi</i>	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk ditingkatkan manajemen produksinya, standarisasinya, perlindungan usahanya dan restrukturisasi usahanya	50 Orang	50 Orang	
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	1. Persentase UMKM yang meningkat labanya	34,20%	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	21%	18,43%	
					Persentase UKM Non BPR LKM Aktif	38.50%	33,49%	
					Persentase BPR/LKM Aktif	100%	100%	
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikat produk	3,60%	14,38%	

				Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	7,30%	6,58%
			<i>Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usaha Mikro</i>	Jumlah kecamatan yang tersedia kredit ekonomi kerakyatan	20 orang	20 Orang
			6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil	66,50%	91,35%
				Pertumbuhan produktivitas UMKM	4,70%	6,97%
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	2,15%	2,26%
			<i>Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	Jumlah UKM yang difasilitasi melalui pameran, penyediaan jaringan informasi pasar, dan sarana promosi produk UKM	30 Unit Usaha	30 Unit usaha

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut merupakan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Secara umum Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung telah dapat mencapai sasaran pembangunan secara efektif dan efisien sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut

Tabel 3.12.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkat-nya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	Pesentase koperasi sehat dan cukup sehat	109,21%	43,04%	39,41%
Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	100%	75,83%	75,83%
Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan usaha menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat kota (Nilai SAKIP OPD)	73,31%	83,98%	-

Tingkat efisiensi dihitung dari selisih antara persentase capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran.

Pada uraian sasaran diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dua indikator Pesentase koperasi sehat dan cukup sehat dan Persentase UMKM yang meningkat labanya penggunaan anggaran masih efektif jika dibandingkan dengan capaian kinerja, namun masih bisa dianggap efektif dan efisien mengingat penyerapan anggaran masih belum efektif.

Berikut adalah alokasi anggaran per indikator kinerja beserta realisasi anggarannya :

Tabel 3.13.
Alokasi per Sasaran Pembangunan

NO	Sasaran	Indikator Kerja	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	1.286.653.886	553.615.252	43,04%
2	Meningkatnya Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	Persentase UMKM yang meningkat labanya	921.779.864	698.997.755	75,83%
3	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan usaha menengah	Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat kota (Nilai SAKIP OPD)	3.587.182.292	3.012.450.332	83,98%

3.3. REALISASI ANGGARAN

- Alokasi anggaran yang disediakan untuk program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2023 sebesar **Rp.5.795.016.042,00** Sedangkan realisasi anggaran adalah sebesar **Rp.4.265.063.339** dengan capaian kinerja **73,60%**. Anggaran untuk program/kegiatan prioritas sebesar **Rp.2.207.833.750,00** realisasi anggaran sebesar **Rp.1.252.613.007,00** dengan capaian kinerja sebesar **56,73%**. Sedangkan anggaran program/kegiatan pendukung sebesar **Rp.3.587.182.292,00** realisasi anggaran sebesar **Rp.3.012.450.332** dengan capaian kinerja **83,98%**

Anggaran dan realisasi keuangan Dinas koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Keuangan
per Program/Kegiatan Tahun 2023
Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung

NO	BELANJA DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabuten/Kota	3.587.182.292	3.012.450.332	83,98
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.000.000	64.000.000	96,67
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.000.000	64.000.000	96,67
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.712.526.042	2.275.116.216	83,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.592.366.042	2.187.336.216	84,38
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120.160.000	87.780.000	73,05
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	172.036.928	125.161.969	72,75
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.636.928	25.266.002	98,55
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	2.961.066	98,70
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	11.000.000	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000	26.603.000	98,53
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000	5.400.000	100
	Sub Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	100.000.000	53.931.901	53,93
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.000.000	83.000.000	97,65
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	85.000.000	83.000.000	97,65
	Kegiatan Penyediaan Jasa	463.000.000	381.100.257	82,31

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	71.000.000	17.100.527	24,08
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	392.000.000	364.000.000	92,86
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.619.322	84.071.890	94,87
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.532.088	33.351.500	99,46
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Kendaraan Operasional atau Lapangan	50.087.234	45.970.390	91,78
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	5.000.000	4.750.000	95
II	Program Dan Pengaawasan dan Pemeriksaan Koperasi	12.960.000	0	0
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.960.000	0	0
	Sub Kegiatan pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan kewenangan Kabupaten/Kota	12.960.000	0	0
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	12.960.000	0	0
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.960.000	0	0
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	12.960.000	0	0
III	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	84.420.136	79.405.800	94,06
	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.420.136	79.405.800	94,06
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	84.420.136	79.405.800	94,06
IV	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasi	410.170.000	393.742.200	95,99
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan	410.170.000	393.742.200	95,99

	Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi (DAK Non Fisik)	410.170.000	393.742.200	95,99
V	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	778.503.750	80.467.252	10,34
	Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	778.503.750	80.467.252	10,34
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan produktivitas, Nilai Tambah, Akses , Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi	778.503.750	80.467.252	10,34
VI	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	102.779.864	80.180.800	78,01
	Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	102.779.864	80.180.800	78,01
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para Pemangku Kepentingan Dalam Perberdayaan Usaha Mikro	102.779.864	80.180.800	78,01
VII	Program Pengembangan UKM	819.000.000	618.816.955	75,56
	Kegiatan Pengembangan Usaha mlkro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha kecil	819.000.000	618.816.955	75,56
	Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	819.000.000	618.816.955	75,56
	JUMLAH	5.795.016.042	4.265.063.339	
	Persentase Keuangan	73,60		

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Hasil laporan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Pencapaian Sasaran strategis :

1. **Meningkat- nya kinerja Kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan akuntabel** terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2023 :
 - Indikator sasaran **“Persentase Koperasi Sehat dan Cukup Sehat”** yang telah melebihi target yang ditetapkan atau sebesar 109,21% dari total indikator dengan kategori **sangat baik**.

2. **Meningkatnya wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri** terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2023
 - Indikator sasaran **“Persentase UMKM yang meningkat labanya”** yang sudah mencapai target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari total indikator dengan kategori **sangat baik**.

3. **Meningkatnya penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Menengah** terdapat satu indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2023 :
- Indikator sasaran “**Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)** dengan nilai B+ (Tahun 2022)

4.2. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, maka untuk kedepannya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung akan mengevaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi data terakhir dan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Bandar Lampung. Selain itu, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun 2023.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung di masa yang akan datang.